

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aarce Tehupeior, 2022, *Monograf Penegakan Hukum Terhadap Praktek Mafia Tanah*, cet, I, UKI Press, Jakarta.
- Arie Sukanti Hutagalung, 2003, *Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y., Hage, 2010, *Legal theory*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan*, cet, XII, Djambatan, Jakarta.
- Buku Tanya Jawab Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, 2008.
- Chomzah, A.A. 2002. *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertipikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Diana R. W. Napitupulu, 2022, *Pendaftaran Tanah Persertipikatan Hak Atas Tanah Dan Peralihannya*, cet, I, UKI Press, Jakarta.
- Frans Magnis Suseno, 1993, *Etika Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die rechtswissenschaft*, Stuttgart: Koehler Verlag.
- Hazairin, 1973, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta.
- I Ketut Oka Setiawan, 2020, *Hukum Agraria*, Reka Cipta, Bandung.
- Isharyanto, 2016, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, cet, I, Deepublish, Yogyakarta.
- Ismaya Samun, 2011, *PENGANTAR HUKUM AGRARIA*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Maskur Hidayat, 2016, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Muchsin, 2003, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia” Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muchsin, et.al, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, cet, II, Refika Aditama, 2010, Bandung.
- Mudakir Iskandar, 2019, *Panduan Mengurus Sertipikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah*, Bhuana Ilmu Poluler Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Nurmaningsih amriani, 2012, *Mediasi alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Prodjodikoro Wirjono, 1986, *Hukum Perdata tentang Hak-hak Atas Benda*, PT Pembimbing Masa, Jakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, cet. I, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rusmadi Murad, 2013, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung Alumni.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Setiono, 2004, “Rule of Law”, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.

Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.

Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Pembaharuan Hukum Agraria*, 1988, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

¹Gunanegara. (2022). Mafia Tanah & Primum Remedium. Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/366094475_MAFIA_TANAH_P_RIMUM_REMEDIUM

Kementerian ATR/BPN. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Indonesia. Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pemerintah Indonesia. Tahun 1960. Undang-Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Pemerintah Indonesia. Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 24 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115)

Pemerintah Indonesia. Tahun 2020. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1369)

Pemerintah Indonesia. Tahun 2001. Ketetapan MPR IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

C. Makalah, jurnal, majalah, dan lain-lain

Sumarto, “Penanganan.dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan.nasional RI” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri.RI tanggal 19 September, 2012.

Syaiful. Azam, “Eksistensi Hukum Tanah dalam mewujudkan tertib Hukum Agraria” Makalah Fakultas.Hukum USU – Digitized by USU Digital Library, 2003.

Elfachri Budiman, “Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)” Jurnal Hukum USU Vol. 01. Nomor 1, Tahun 2005.

D. Lampiran

Putusan Nomor 743/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.

